

DAMPAK POLITIK UANG PADA KARAKTER PEMILIH PEMULA: PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Eficha Hadi Putri¹⁾, Titi Darmi²⁾, Rifa'i³⁾

¹²³⁾ Universitas Muhammadiyah Bengkulu
e-mail : efichadi06@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords:

The Impact of Money Politics on the Character

The Impact of Money Politics on the Character of First-Time Voters and How Islamic Religious Education Can Be a Solution in Shaping Clean and Integrity-Based Political Awareness. Money politics has a negative impact on the character of first-time voters, making them more likely to vote based on material benefits rather than the candidates' vision and mission. From the perspective of Islamic religious education, there is a strong emphasis on the prohibition of *ri'syah* (bribery) and the importance of fostering voters with clean political awareness. Islamic religious education plays a crucial role in shaping first-time voters with integrity by internalizing Islamic ethical values in the electoral process. The Islamic Education curriculum (PAI) should emphasize critical political awareness to prevent first-time voters from being easily influenced by money politics.

Kata kunci:

Dampak Politik Uang Terhadap Karakter Pemilih Pemula

Abstrak.

Dampak politik uang terhadap karakter pemilih pemula serta bagaimana pendidikan agama Islam dapat menjadi solusi dalam membentuk kesadaran politik yang bersih dan berintegritas. Politik uang memiliki dampak negatif terhadap karakter pemilih pemula, membuat mereka cenderung memilih berdasarkan keuntungan materi daripada visi dan misi calon. Perspektif pendidikan agama Islam menekankan larangan terhadap *ri'syah* (suap) dan pentingnya membentuk pemilih yang memiliki kesadaran politik bersih. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemilih pemula yang berintegritas melalui internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam pemilu. Kurikulum PAI perlu mengajarkan kesadaran politik yang kritis agar pemilih pemula tidak mudah terpengaruh politik uang.

PENDAHULUAN

Politik uang (*money politics*) merupakan fenomena yang masih marak dalam setiap pemilihan pemimpin di Indonesia. Politik uang tetap menjadi isu yang meresap dalam pemilihan pemimpin di Indonesia, merusak integritas demokrasi dan kepercayaan pemilih. Fenomena ini, yang ditandai dengan praktik-praktik seperti “serangan fajar” dan distribusi barang kepada konstituen, mencerminkan pendekatan transaksional terhadap politik yang memprioritaskan insentif keuangan daripada keterlibatan pemilu yang asli. Politik uang mengarah pada keuntungan yang tidak adil bagi kandidat yang mampu membeli suara hingga miring proses

demokrasi (Suryaningsi & Putri, 2024) Bagian ini mengeksplorasi implikasi dan tanggapan terhadap politik uang di Indonesia. Kandidat sering menggunakan “serangan fajar,” di mana uang didistribusikan kepada pemilih sebelum pemilihan, membahayakan proses demokrasi dan mendorong korupsi (Djuyandi & Mahmuda, 2024).

Pemilih pemula, yang terdiri dari usia 17-20 tahun yang pertama kali menggunakan hak pilihnya, sering menjadi sasaran politik uang karena minimnya pengalaman politik, kurangnya pemahaman terhadap sistem demokrasi, serta lemahnya kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan integritas calon menjadi faktor utama yang membuat mereka rentan terhadap bujukan politik uang. Selain itu, keterlibatan politik dan kepercayaan mereka yang terbatas pada pemerintah dapat membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi melalui insentif keuangan (Amy, 2011). Akibatnya, keputusan memilih tidak lagi didasarkan pada visi, misi, dan kapabilitas calon, melainkan karena adanya imbalan materi yang diberikan. Demografi ini rentan terhadap taktik pembelian suara, karena mereka mungkin merasakan rasa kewajiban ketika menerima uang, yang dapat menyebabkan perilaku pemungutan suara timbal balas (Frederico, 2012). Selain itu, politik uang memiliki dampak yang signifikan pada karakter pemilih pemula dalam proses pemilihan, seperti Pragmatisme dalam Memilih, dalam proses seleksi mencerminkan model pilihan rasional di mana hasil praktis menutupi nilai-nilai ideologis, berpotensi mengarah pada kemunduran demokrasi (Prianto & Yulsaini, 2024). Sebaliknya, pragmatisme dapat merampingkan pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi tata kelola, pragmatisme juga berisiko mengesampingkan nilai-nilai demokrasi yang penting dan keterlibatan warga negara, meningkatkan kekhawatiran tentang kesehatan jangka panjang sistem politik lokal (Ansell, 2022).

Pemilih pemula cenderung melihat politik sebagai transaksi ekonomi daripada sebagai tanggung jawab sosial. Mereka lebih fokus pada keuntungan materi yang didapat daripada mempertimbangkan kualitas calon pemimpin (Alhajmi dkk., 2024). Menurunnya Kesadaran Moral dan Etika Politik, politik uang mengajarkan pemilih pemula untuk mengabaikan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan politik. Pemilih pemula sering memprioritaskan manfaat keuangan langsung daripada pertimbangan etis jangka panjang, yang mengarah ke pandangan transaksional tentang politik (Damanik dkk., 2023a). Mereka menjadi kurang peduli terhadap integritas dan visi-misi calon pemimpin, yang pada akhirnya merusak sistem demokrasi. Pergeseran fokus ini mengurangi pentingnya integritas kandidat dan visi masa depan, karena pemilih merasa terdorong untuk menerima uang daripada mengevaluasi kandidat secara kritis (Sari dkk., 2023). Normalisasi Praktik Politik uang politik, karena uang dapat mencegah keterlibatan politik yang tulus, terutama di kalangan pemilih pemula, yang mungkin terpengaruh oleh insentif keuangan daripada pilihan yang diinformasi (Hasan dkk., 2023) Responden menunjukkan kecenderungan untuk menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar dalam pemilu. Penerimaan politik uang dapat menormalkan korupsi, sehingga sulit bagi pemilih muda untuk mengenali pentingnya integritas dalam kepemimpinan (Sari dkk., 2023). Sikap ini berbahaya karena dapat memperkuat budaya korupsi di masa depan, di mana masyarakat lebih menerima praktik suap dan nepotisme dalam politik (Argo Lankamo dkk., 2024). Serta minimnya Kesadaran Kritis, beberapa pemilih pemula di bawah 20 memandang politik uang sebagai hal biasa, mereka mengakui dampak negatifnya pada integritas pemilihan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kritis, yang menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam diskusi publik dan pencarian informasi kandidat (Junaedi dkk., 2024). Pemilih pemula yang terpapar politik uang sering kali tidak memiliki kesadaran kritis terhadap proses politik. Mereka kurang berpartisipasi dalam diskusi publik dan tidak aktif dalam mencari informasi mengenai calon yang mereka pilih (Damanik dkk., 2023).

Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan etika dengan menanamkan nilai-nilai agama yang memandu perilaku moral, termasuk dalam aspek politik, memastikan individu bertindak dengan integritas dan mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam tugas kewarganegaraan mereka (Nadri, 2020). Islam melarang penyuaipan (risywah), menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Studi ini menyimpulkan bahwa politik uang adalah bentuk risywah, melanggar hukum negara dan hukum syariah, sehingga memperkuat penolakan politik uang (Royan, 2021).

Dengan fenomena tersebut saya tertarik untuk meneliti dan menganalisis dampak politik uang memengaruhi karakter pemilih pemula dan bagaimana pendidikan agama Islam dapat berperan dalam membangun kesadaran politik yang bersih dan berintegritas. Dengan memahami hubungan antara politik uang dan pendidikan agama Islam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam membangun demokrasi yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena peneliti berusaha memahami fenomena politik uang secara mendalam dari sudut pandang pemilih pemula serta bagaimana pendidikan agama Islam dapat berperan dalam membentuk kesadaran politik mereka. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis realitas sosial terkait dampak politik uang terhadap karakter pemilih pemula serta relevansinya dalam perspektif pendidikan agama Islam. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilih pemula berusia 17-20 tahun yang baru pertama kali mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Mereka menjadi fokus utama penelitian karena masih dalam tahap pembentukan karakter politiknya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

1. Sumber data

Sumber data yaitu terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber Data Primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu melalui pengamatan, wawancara, eksperimen, atau survei yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Data ini bersifat orisinal dan lebih langsung terkait dengan tujuan penelitian. Adapun Sumber Data Sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk analisis lebih lanjut. Data ini biasanya telah tersedia dalam bentuk laporan, buku, artikel, atau database yang telah ada.

2. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

- 1) Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pemilih pemula untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dampak politik uang dan strategi pendidikan agama Islam dalam membangun karakter pemilih.
- 2) Pertanyaan wawancara mencakup pengalaman pemilih pemula terhadap politik uang, persepsi mereka terhadap integritas dalam pemilu, serta pandangan guru dan akademisi mengenai peran pendidikan agama Islam dalam menangkal politik uang.

2. Observasi

Observasi dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi untuk melihat bagaimana pemilih pemula memahami dan menyikapi isu politik uang.

3. Studi Dokumen

Penelitian ini menganalisis bahan ajar Pendidikan Agama Islam yang membahas nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam kehidupan sosial termasuk dalam politik.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Reduksi Data

- 1) Proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- 2) Data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti karakter pemilih pemula, dampak politik uang, serta peran pendidikan agama Islam.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

3. Penarikan Kesimpulan

- 1) Kesimpulan diambil berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis.
- 2) Kesimpulan bersifat sementara dan terus diperiksa ulang selama penelitian berlangsung untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai risywah (suap), yang secara jelas dilarang dalam ajaran agama. Suap merusak prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan pada kepemimpinan dengan mendistorsi hasil pemilu, yang mengarah pada konsumsi kekayaan yang tidak adil dan kesombongan (Hisny Fajrusalam dkk., 2023) Beberapa dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang relevan mengenai larangan politik uang adalah sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنِّمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْخِلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan jangan (pula) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud untuk memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan) dosa, padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menekankan larangan transaksi yang tidak adil, termasuk penyuapan, yang dianggap sebagai tindakan penghujatan dalam Islam. Perspektif ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyoroti implikasi etis dari pelanggaran keuangan baik dalam konteks pribadi maupun sosial contohnya Praktik penyuapan, yang disebut sebagai risywah, secara eksplisit dikutuk dalam ajaran Islam, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan dalam transaksi.

Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang praktik suap dalam kepemimpinan, sebagaimana dalam hadits berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ

"Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya."
(HR. Abu Dawud No. 3580, Tirmidzi No. 1337, dan Ibnu Majah No. 2313, shahih)

Hadits ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya mencoreng nilai-nilai keadilan, tetapi juga dapat menjadi sumber kebinasaan moral dan merusak sistem sosial. Dalam konteks pemilihan kepada daerah, menerima atau memberi uang untuk memperoleh dukungan suara termasuk dalam kategori perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dari dalil ayat al-Quran dan Hadist tersebut menjelaskan bahwa Islam dengan tegas menolak penyuapan, menyatakan tidak diperbolehkan bagi Nabi Muhammad (SAW) untuk terlibat dalam tindakan seperti itu. Suap dianggap merugikan kepentingan publik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas Islam (Arafa, 2012). Risywah atau penyuapan dilarang keras dalam hukum Islam karena dianggap melanggar hukum, merusak keadilan dan integritas, dan dikategorikan sebagai dosa berat dengan konsekuensi serius (Yuwanamu & Haq, 2024). Ini merugikan kepentingan publik, sering dilakukan oleh pejabat yang tidak bermoral, dan mencerminkan perilaku manusia negatif yang didorong oleh kepentingan egois, berdampak buruk pada masyarakat (Sastra, 2024). Oleh karena itu, dari perspektif Islam, politik uang harus dilawan dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam memilih pemimpin.

1. Strategis Dalam Membentuk Karakter Pemilih Pemula Yang Berintegritas Dalam Pendidikan Agama Islam

Untuk menangkal pengaruh negatif politik uang, pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter pemilih pemula yang berintegritas. Peneliti mendapatkan beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pendidikan agama Islam dari hasil wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

1) Integrasi Nilai Antikorupsi dalam Kurikulum PAI

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa agar memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi, termasuk dalam menolak praktik korupsi dan politik uang. Berdasarkan hasil penelitian, integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum PAI dapat menjadi strategi efektif dalam membangun generasi pemilih pemula yang berintegritas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam kurikulum PAI, antara lain:

a. Penguatan Materi tentang Kejujuran dan Amanah

Dalam kurikulum PAI, materi tentang kejujuran dan amanah dapat dikaitkan dengan isu korupsi dan politik uang. Misalnya, ketika membahas kisah Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin (yang terpercaya), guru dapat mengaitkannya dengan pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan tidak menggunakan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan.

b. Kajian Ayat dan Hadits tentang Antikorupsi

Dalam pembelajaran tafsir dan hadits, siswa dapat diajak untuk mendiskusikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang melarang korupsi dan politik uang. Guru juga dapat memberikan contoh kasus nyata yang menunjukkan dampak negatif dari praktik politik uang dalam kehidupan masyarakat.

c. Pembelajaran Berbasis Studi Kasus

Siswa dapat diberikan studi kasus tentang dampak politik uang dan korupsi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Melalui diskusi kelompok, mereka dapat menganalisis bagaimana Islam memandang praktik tersebut dan bagaimana cara mencegahnya.

d. Simulasi Pemilu Bersih di Sekolah

Salah satu metode pembelajaran yang efektif adalah simulasi pemilihan di lingkungan sekolah dengan menekankan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih ketua OSIS atau pemimpin kelas dengan aturan yang mencegah politik uang dan suap, sehingga mereka dapat memahami pentingnya proses demokrasi yang bersih.

e. Penerapan Sikap Antikorupsi dalam Kehidupan Sehari-hari

Guru PAI dapat mengajarkan siswa untuk membiasakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak menyontek saat ujian, tidak berbohong, dan tidak mengambil hak orang lain. Kebiasaan kecil ini akan membentuk karakter siswa yang lebih kuat dalam menolak praktik politik uang ketika mereka menjadi pemilih pemula.

2. Penerapan Metode Pembelajaran Berbasis Nilai

Metode pembelajaran berbasis nilai adalah pendekatan dalam menekankan penginternalisasian nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam proses pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), metode ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar memiliki kesadaran moral yang tinggi, termasuk dalam mengambil keputusan politik seperti memilih pemimpin. Contoh penerapan metode pembelajaran berbasis nilai, berupa :

a. Storytelling tentang Kepemimpinan yang Adil dalam Islam

Storytelling atau bercerita adalah teknik pengajaran yang menggunakan kisah-kisah inspiratif sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks politik dan kepemimpinan, guru PAI dapat menyampaikan kisah-kisah dari sejarah Islam yang menunjukkan kepemimpinan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Beberapa contoh kisah yang bisa digunakan dalam pembelajaran: Kepemimpinan Rasulullah SAW: Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin yang amanah, tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan selalu mengutamakan kesejahteraan umat.

- 1) Khalifah Umar bin Khattab: Dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, bahkan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyatnya. Ia pernah mengatakan, *"Jika ada seekor keledai yang jatuh di jalanan Irak, maka aku takut Allah akan memintai pertanggungjawabannya kepadaku karena tidak memperbaiki jalannya."*
- 2) Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq: Menolak menerima gaji tinggi sebagai pemimpin dan memilih hidup sederhana untuk memastikan tidak ada rakyat yang menderita.

Dengan mendengar kisah-kisah ini, peserta didik dapat memahami bahwa pemimpin yang baik bukanlah yang membeli suara dengan uang, tetapi yang benar-benar memiliki integritas dan kepedulian terhadap rakyatnya.

a. Simulasi Pemilihan yang Jujur di Lingkungan Sekolah

Simulasi pemilihan adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa mengalami secara langsung bagaimana proses pemilihan yang bersih dan demokratis berlangsung. Hal ini akan membantu siswa memahami pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Dalam simulasi ini, siswa dapat diberikan peran sebagai:

1. Kandidat pemimpin yang harus menyampaikan visi-misinya tanpa melakukan politik uang.

2. Pemilih yang harus menilai calon berdasarkan kualitas dan integritasnya, bukan karena iming-iming hadiah.
3. Panitia pemilu yang bertanggung jawab memastikan pemilu berjalan transparan dan adil.

Melalui simulasi ini, siswa akan memahami bagaimana pemilihan yang bersih itu dilakukan, membentuk kesadaran moral siswa sejak dini agar mereka menjadi pemilih yang bertanggung jawab, memiliki integritas, dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang serta menyadari bahwa politik uang adalah tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan.

3. Peningkatan Kesadaran Politik Islam melalui Kajian dan Dakwah

Kajian dan dakwah merupakan dua pendekatan strategis dalam meningkatkan kesadaran politik Islami, khususnya bagi pemilih pemula. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa praktik efektif yang dapat diterapkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kajian politik Islam memiliki peran signifikan dalam memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang pentingnya etika dalam berpolitik. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Agama Islam (PAI) dan akademisi, kajian yang dilakukan di lingkungan sekolah, masjid, atau kampus berfokus pada tiga hal utama:

1. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kajian ini menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki sifat amanah, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini dijelaskan melalui kisah kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, seperti Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab.

2. Larangan Politik Uang dalam Islam

Kajian ini mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang melarang praktik politik uang. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188 menjadi dasar bahwa suap, termasuk dalam konteks politik, adalah perbuatan yang haram. Selain itu, hadits Nabi SAW yang melaknat pemberi dan penerima suap juga menjadi materi penting.

3. Tanggung Jawab Pemilih dalam Islam

Dalam kajian ini, peserta didik diajarkan bahwa memilih pemimpin adalah amanah yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Guru PAI menyampaikan bahwa memilih pemimpin yang tidak berkualitas akibat politik uang dapat merugikan masyarakat secara luas dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dakwah memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan politik Islami kepada pemilih pemula. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa bentuk dakwah yang efektif:

1) Khutbah Jumat dan Ceramah Keagamaan

Pemuka agama memanfaatkan momentum khutbah Jumat dan ceramah di masjid untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan menghindari politik uang. Pesan-pesan ini disampaikan dengan mengutip dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits untuk memberikan dasar agama yang kuat.

2) Diskusi Keislaman dan Dialog Interaktif

Di sekolah dan kampus, diskusi keislaman tentang etika politik sering diadakan. Forum ini memberikan kesempatan kepada pemilih pemula untuk bertanya dan mendalami isu politik Islami, termasuk dampak negatif politik uang.

3) Dakwah Digital

Mengingat pemilih pemula adalah generasi yang akrab dengan teknologi, dakwah digital menjadi metode yang efektif. Konten-konten edukatif berupa video, infografis, dan podcast tentang politik Islami banyak ditemukan di media sosial. Guru PAI dan organisasi keislaman juga memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan pesan anti-politik uang dan mendorong partisipasi politik yang berintegritas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peserta yang terlibat dalam kajian dan dakwah tentang politik Islami lebih kritis dalam menghadapi politik uang. Mereka memahami bahwa menerima atau memberikan uang dalam konteks pemilu adalah bentuk suap yang dilarang oleh Islam. Selain itu, mereka lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritasnya, bukan karena dorongan materi.

4. Penguatan Peran Keluarga dalam Menanamkan Etika Politik

Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai etika anak sejak dini, termasuk dalam aspek politik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keluarga, terutama orang tua, memiliki pengaruh signifikan dalam menanamkan kesadaran politik Islami kepada pemilih pemula. Peran Keluarga dalam Pendidikan Moral dan Politik Islami. Dalam wawancara dengan pemilih pemula diketahui bahwa keluarga yang aktif mendiskusikan isu politik dari perspektif Islam cenderung memiliki anak-anak yang lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas.

Beberapa bentuk peran keluarga dalam menanamkan etika politik antara lain:

a. Menanamkan Nilai Kejujuran dan Amanah

Orang tua dapat memberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin adalah amanah, sesuai dengan firman Allah: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa: 58). Nilai ini diajarkan melalui contoh konkret, seperti tidak menerima atau memberikan uang dalam konteks pemilihan umum.

b. Memberikan Teladan dalam Berpolitik Secara Islami.

Anak-anak sering kali meniru perilaku orang tua mereka. Jika orang tua memiliki sikap politik yang bersih dan tidak terlibat dalam praktik politik uang, anak-anak cenderung mengadopsi prinsip yang sama.

c. Mendorong Diskusi Kritis tentang Politik Islami

Dalam beberapa keluarga, orang tua mengajak anak berdiskusi tentang pemilu, politik uang, dan pemimpin yang baik dalam Islam. Diskusi ini memperkuat pemahaman anak bahwa memilih pemimpin bukan sekadar kepentingan pribadi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga sebagai Benteng dari Politik Uang. Berdasarkan hasil observasi, keluarga yang menerapkan Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari lebih mampu membangun kesadaran anak terhadap bahaya politik uang. Beberapa strategi yang diterapkan keluarga antara lain:

- 1) Membiasakan Anak untuk Memahami Konsep Halal dan Haram dalam Politik
- 2) Mengenalkan Kisah-Kisah Pemimpin Islam yang Jujur dan Adil.
- 3) Melatih Anak untuk Tidak Mudah Terpengaruh oleh Iming-Iming Materi

Hasil wawancara dengan pemilih pemula menunjukkan bahwa mereka yang berasal dari keluarga yang aktif memberikan pendidikan politik Islami lebih mampu menolak praktik politik uang dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan dari keluarga. Beberapa indikasi efektivitas peran keluarga meliputi:

- 1) Kesadaran lebih tinggi terhadap dampak negatif politik uang: Pemilih pemula lebih kritis dalam menilai kandidat dan tidak mudah terpengaruh oleh janji materi.
- 2) Pemahaman lebih baik tentang tanggung jawab sebagai pemilih: Mereka lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai Islami daripada kepentingan pribadi.
- 3) Keberanian untuk menolak politik uang: Pemilih pemula lebih tegas dalam menolak pemberian uang atau hadiah dalam pemilu.

5. Pelibatan Pemilih Pemula dalam Gerakan Sosial Anti-Politik Uang

Pemilih pemula memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem demokrasi yang sehat dan bebas dari politik uang. Sebagai kelompok yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan, pemilih pemula cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai baru, termasuk pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam gerakan sosial anti-politik uang menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kesadaran politik yang lebih baik di kalangan generasi muda.

Berdasarkan wawancara dengan pemilih pemula dan aktivis gerakan sosial, ditemukan bahwa banyak pemilih pemula yang sebenarnya memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam gerakan sosial anti-politik uang. Namun, mereka masih menghadapi keterbatasan informasi, kurangnya wadah untuk berpartisipasi, dan pengaruh lingkungan yang masih cenderung permisif terhadap politik uang. Islam menekankan pentingnya partisipasi dalam amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), termasuk dalam konteks politik yang bersih. Firman Allah dalam Al-Qur'an menegaskan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Hadis Rasulullah SAW juga menyatakan:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." (HR. Muslim No. 49)

Dalam konteks gerakan sosial anti-politik uang, pemilih pemula dapat berperan dalam menyuarakan bahaya politik uang melalui berbagai platform dan aksi nyata di masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam gerakan sosial anti-politik uang, penelitian ini menemukan beberapa strategi yang dapat diterapkan, antara lain:

- a. Edukasi dan Kampanye Kesadaran di Kalangan Pemilih Pemula
- b. Mengadakan seminar, diskusi, dan workshop di sekolah dan kampus tentang bahaya politik uang.
- c. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi edukatif tentang dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas.
- d. Pendirian Komunitas Pemilih Muda Anti-Politik Uang
- e. Mendorong pembentukan komunitas di sekolah dan universitas yang fokus pada edukasi politik bersih.
- f. Melibatkan pemilih pemula dalam diskusi rutin, kajian Islam tentang kepemimpinan, dan advokasi pemilu yang bersih.
- g. Keterlibatan dalam Kegiatan Sosial dan Volunteering
- h. Pemilih pemula dapat berperan dalam kegiatan sosial yang bertujuan membangun kesadaran politik, seperti mengadakan aksi damai, debat publik, dan penyuluhan ke masyarakat.
- i. Berpartisipasi sebagai pengawas pemilu independen untuk memastikan jalannya pemilu yang adil dan transparan.
- j. Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye Anti-Politik Uang
- k. Pemilih pemula dapat membuat konten edukatif berupa video pendek, infografis, dan tulisan yang membahas bahaya politik uang serta pentingnya memilih berdasarkan nilai-nilai Islam.
- l. Mendorong kampanye digital dengan tagar (#TolakPolitikUang, #PemilihBerintegritas, #DemokrasiBersih) untuk menjangkau lebih banyak orang.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterlibatan pemilih pemula dalam gerakan sosial memiliki dampak positif, antara lain:

- 1) Meningkatkan Kesadaran Politik: Pemilih pemula yang terlibat dalam gerakan sosial lebih memahami pentingnya pemilu yang bersih dan tidak mudah tergoda oleh politik uang.

- 2) Menyebarkan Pengaruh Positif ke Sesama Pemilih Muda: Melalui komunitas dan media sosial, pemilih pemula dapat menjadi agen perubahan yang menginspirasi teman-teman sebaya mereka untuk menolak politik uang.
- 3) Meningkatkan Partisipasi dalam Pemilu yang Berintegritas: Mereka yang aktif dalam gerakan sosial lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak, bukan berdasarkan uang atau hadiah yang ditawarkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa politik uang memiliki dampak signifikan terhadap karakter pemilih pemula. Pemilih pemula, yang umumnya masih minim pengalaman dan pemahaman politik, rentan terhadap praktik politik uang yang dapat mengikis nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran politik yang bersih. Fenomena ini dapat menyebabkan mereka cenderung memilih kandidat bukan berdasarkan visi, misi, dan integritas, melainkan karena insentif material yang diberikan.

Dari perspektif Pendidikan Agama Islam (PAI), politik uang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan amanah dalam memilih pemimpin. Islam secara tegas melarang suap dan praktik politik yang tidak bermoral sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ayat QS. Ali Imran: 104 menggarisbawahi pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang politik, sementara hadis HR. Muslim No. 49 menegaskan kewajiban setiap Muslim untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kapasitasnya.

Diharapkan pemilih pemula dapat memiliki kesadaran politik yang lebih baik dan mampu berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi antara sekolah, keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam membangun pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam untuk membentuk generasi pemilih yang jujur, cerdas, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhajmi, M. F., Berampu, N. K. R., Zulkarnaen, I., & Sutarjo, M. (2024). Political Participation Of Beginners In The 2024 General Election In Cirebon City. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(7), 576–583. <https://doi.org/10.57096/edunity.v3i7.268>
- Amy, K. , Syvertsen. , L. W.-Lake. , C. A. , Flanagan. , D. , W. Osgood. , L. Briddell. (t.t.). *Thirty-Year Trends in U.S. Adolescents' Civic Engagement: A Story of Changing Participation and Educational Differences*.
- Ansell, C. (2022). Pragmatism. Dalam *Handbook on Theories of Governance*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00046>
- Arafa, M. A. (2012). Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice? Dalam *Annual Survey of International & Comparative Law* (Vol. 18, Nomor 1). <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurveyhttp://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol18/iss1/9>
- Argo Lankamo, A., Jilo Dira, S., Wariso Wako, H., & Kia Lagide, K. (2024). Public Perception on Corruption and Bribery in Sidaama National Regional State, Ethiopia. Dalam *Corruption, Bribery, and Money Laundering - Global Issues*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1004007>
- Damanik, I. P. C., Bangun, J. A., Putra, B. A., Boangmanalu, V. S., Bangun, K. T. E. K., & Ivanna, J. (2023a). PEMAHAMAN PEMILIH PEMULA TERHADAP MONEY POLITIC

- MENJELANG PEMILU 2024 PADA MAHASISWA PPKn UNIMED STAMBUK 2023. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 798–804. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2070>
- Damanik, I. P. C., Bangun, J. A., Putra, B. A., Boangmanalu, V. S., Bangun, K. T. E. K., & Ivanna, J. (2023b). PEMAHAMAN PEMILIH PEMULA TERHADAP MONEY POLITIC MENJELANG PEMILU 2024 PADA MAHASISWA PPKn UNIMED STAMBUK 2023. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 798–804. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2070>
- Djuyandi, Y., & Mahmuda, D. (2024). Phenomenon of the “dawn attacks operation” as a money politics practices in Indonesian election. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 318–332. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14239>
- Frederico, Finan. , L. Schechter. (2012). *vote-Buying and Reciprocity*.
- Hasan, E., Aminah, A., Haji Hamil, H. J., & Mukhrijal, M. (2023). The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of Beginner Voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576>
- Hisny Fajrusalam, Kurniasih Kurniasih, Mariya Ulfa Dwi Shafarani, Nurwaci Nurwaci, & Putri Dwi Fachrani. (2023). Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam? *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(3), 28–47. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.139>
- Junaedi, H. P., Wulandari, T. C., Utami, A. P., Putri, I. W., Putri, I. W., & Fitri Z, Y. (2024). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 193–202. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v6i2.1282>
- Nadri, Taja. , E. S. Nurdin. , A. Kosasih. , E. Suresman. (2020). *Conceptual model of internalization of religious ethical value in education perspective islamic characters*. .
- Prianto, A. L., & Yuslaini, N. (2024). HOW LOCAL DEMOCRATIC BACKSLIDING? SINGLE CANDIDATE, PRAGMATISM AND UNCOMPETITIVE LOCAL HEAD ELECTION IN INDONESIA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 177. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53451>
- Royan, A. Sufyan. , D. W. (2021). . *The Practice of Money Politics Ahead of Elections in Hadith Review*. .
- Sari, M. M. K., Huda, M., & Warsono, W. (2023). University student voters’ resistance to money politics. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 31–40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.988>
- Sastra, I. (2024). Risywah in the Perspective of Islamic and Positive Law. *Tradition and Modernity of Humanity*, 4(3), 72–77. <https://doi.org/10.32734/tmh.v4i3.17289>
- Suryaningsi, S., & Putri, N. A. (2024). Against The Practice of Money Politics: An Analysis of The Potential For Bribery Prevention In The Conduct of Elections. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 1(2), 78–86. <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i2.141>
- Yuwanamu, I., & Haq, S. Z. (2024). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM AL-QURAN (Perskripsi Moral-Religius dalam Memerangi Praktik Rasuah). *Turats*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.33558/turats.v17i1.9781>